

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multi sektoral dalam arti sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai program dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi alam yang berlimpah maka akan mendapatkan asset pembangunan apabila dikembangkan secara tepat dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun disisi lain telah terjadi kepincangan dalam pelaksanaan demokrasi yaitu dimana proses pengambilan kebijakan atau keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak berlangsung tanpa keterlibatan substansial. Pembatasan akses masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan. Para Pengambil kebijakan menempatkan diri sebagai pihak yang memiliki otonomi untuk mengambil keputusan walaupun tanpa kerlibatan secara politik dan persetujuan masyarakat desa

Keberadaan partisipasi politik masyarakat melemah yang ada hanyalah keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong dan finansial masyarakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah desa. Partisipasi politik yang bermacam- macam di batas dan politik masyarakat lebih di utamakan pada penerapan program pembangunan yang dirancang oleh para elit desa. Pelaksanaan program pembangunan desa oleh pemerintah telah membuat desa dan masyarakatnya menjadi semakin tidak berdaya secara politik. Proses pembangunan desa yang berjalan tidak menjadikan desa menjadi semakin berkembang menjadi lebih baik dan bermakna namun malah sebaliknya. Ini menjadikan desa secara social ekonomi dan politik justru tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan desa menunjukkan kegagalan karena kurangnya partisipasi politik masyarakat desa. Masyarakat desa merasa pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil rakyat dan tidak menguntungkan masyarakat banyak. Selain itu masyarakat kurang mengerti dan memahami bahwa pembangunan dimaksudkan untuk keuntungan masyarakat banyak namun pelaksanaannyapun tidak sesuai dengan pemahaman bahwa pembangunan berujuan untuk menguntungkan masyarakat banyak. Hal itu karena rakyat tidak secara besar dilibatkan.

Kebijakan pembangunan desa menitikberatkan pada aspek partisipasi politik masyarakat desa. Respon terhadap program pembangunan dan aspek keberlanjutan program bagi masyarakat desa ditengah keberagaman kemampuan dan kepentingan masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sangat terbatas

akan mewujudkan pengembangan program yang tidak melahirkann kelompok terpinggirkan baru. Partisipasi politik masyarakat desa akan menghindari kebijakan program dana pembangunan desa yang sentralistik . Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya partisipasi politik masyarakat desa secara aktif untuk mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan desa yang di hadapi dengan alternative pemecahannya yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu pentingnya melihat pengaruh antara faktor sosial ekonomi, politik terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut mandek diatas kertas.

Karena pada kenyataannya desa sekedar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direguk oleh actor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut : bisa elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat.¹ Di desa, pembangunan fisik menjadi indicator keberhasilan pembangunan. Karena itu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ada sejak tahun 2000 dan secara teoritis memberi kesempatan pada desa untuk menentukan arah pembangunan dengan

¹ *Kompas, Minggu 12 November 2006 (Jangan bunuh desa kami) oleh Marwanto*

menggunakan dana PPK, orientasi penggunaan dananya pun lebih untuk pembangunan fisik.

Menyimak realitas diatas, memang benar bahwa yang selama ini terjadi sesungguhnya adalah “Pembangunan di desa” dan bukan pembangunan untuk, dari dan oleh desa. Desa adalah unsur bagi tegak dan eksisnya sebuah bangsa (nation) bernama Indonesia. Kalaupun derap pembangunan merupakan sebuah program yang diterapkan sampai kedesa-desa, alangkah baiknya jika menerapkan konsep :”Membangun desa, menumbuhkan kota”. Konsep ini, meski sudah sering dilontarkan oleh banyak kalangan, tetapi belum dituangkan ke dalam buku yang khusus dan lengkap. Inilah tantangan yang harus segera dijawab.

Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa di Indonesia yang pembangunan infrastrukturnya tidak meningkat secara signifikan. Seperti jalan umum yang dari dulu hingga sekarang masih buruk. Pergantian birokrasi Desa dari tahun ke tahun tidak merubah kondisi infrastruktur desa menjadi semakin baik malah sebaliknya, semakin buruk. Pemerintah Desa Gunungreja kurang mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa. Infrastruktur yang keberadaanya sangat penting bagi masyarakat desapun tidak begitu diperhatikan keadaannya. Hal itu membuat persepsi baru bagi sebagian orang bahwa pembangunan di desa tersebut tidak berjalan semestinya karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh desa tersebut. Kondisi yang demikian tidak membuat para aparatur untuk segera melakukan pembangunan fisik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat, malah sebaliknya para pemerintah desa sibuk memikirkan dana yang akan dan harus dikeluarkan bukan untuk kepentingan mendesak masyarakat. Dana yang tersedia khusus untuk pelaksanaan pembangunan malah dipotong sana sini untuk keperluan yang seharusnya tidak perlu. Selain itu pemerintah Desa Gunungreja juga kurang kreatif dan inovatif dalam menambah pendapatan desa. Pemerintah hanya bergantung pada bantuan yang datang dari pemerintah pusat maupun kabupaten. Jika hal itu dilakukan oleh pemerintah desa dari tahun ketahun maka sangat tidak mungkin pembangunan fisik akan tercukupi. Yang ada malah pembangunan desa yang semakin terpuruk. Padahal sebenarnya Desa Gunungreja bukan termasuk desa yang tidak mempunyai apa-apa untuk dikembangkan. Ada pasar dan yang lainnya yang siap untuk dikembangkan.².

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berupaya secara optimal dalam hal pembangunan fisik desa. Pada tahun 2008 hanya ada beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakan namun tidak semua program tersebut tidak berjalan atau tidak terlaksana seperti pembangunan jalan dan pembangunan masjid. Sedangkan pada tahun 2009 dari program-program pembangunan tersebut yang dapat terlaksana hanya program pengaspalan jalan dan penerangan jalan. Tabel ini berisi beberapa program pembangunan fisik Desa Gunungreja pada Tahun 2008/2009

² Hasil observasi di Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap pada 16 Februari 2010

Tabel 1.1
Program Pembangunan Fisik Desa Gunungreja

No	Kegiatan pembangunan	Lokasi
1.	Tahun 2008. a. Betonisasi b. Paving Blok c. Tugu selamat datang d. Pembangunan jalan e. Pembangunan masjid	Jln. Manunggal Rt 01/ 02 Jln. Kelapa sawit Jn. Karang mencil Rt 04/01
2.	Tahun 2009. a. Pemb.Draenase. b. Pengaspalan jalan c. Penerangan jalan. d. Pemb. Gedung BPD	RT 01, 02/ 04 Jln. Kelapa sawit dan Jl. Hj. Yasin Desa Kauman Balai Desa

Sumber: RPJM Desa Gunungreja.

Jika menyinggung masalah partisipasi politik masyarakat Desa Gunungreja dalam kaitannya dengan pembangunan maka dapat dikatakan partisipasi politik yang mengkhawatirkan. Maksudnya mengkhawatirkan adalah khawatir punah. Mengapa demikian? Hal itu karena masyarakat tidak banyak terlibat dalam segala kebijakan yang beraitan dengan pembangunan fisik. Masyarakat hanya terlibat dalam tahap pelaksanaan pembangunan atau dengan kata lain gotong royong. Masyarakat oleh pemerintah Desa Gunungreja kurang

dilibatkan dalam tahap perumusan, penetapan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan fisik yang direncanakan berjalan secara pincang. Keberadaan BPD sebagai wakil dari masyarakat juga kurang memegang erat aspirasi masyarakat yang seharusnya disampaikan kepada eksekutif desa. Keberadaan BPD dirasa hanya sebagai formalitas dan pelengkap kelembagaan desa. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD hanya sekedar lewat, ibarat kata pepatah 'masuk telinga kanan keluar telinga kiri'. Itulah gambaran otonomi desa yang kata sebagian orang otonomi desa adalah otonomi yang asli, dan utuh. Tapi keyataannya jauh dari asli dan utuh.³

B. Perumusan Masalah

Beritik tolak dari pemaparan latarbelakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penulisan ini adalah:

“Fakor–Faktor Apa yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap pada tahun 2008?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui factor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap pada tahun 2008.

³ Hasil observasi di Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap pada 16 Februari 2010

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

Bagi ilmu pengetahuan

- a. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam fokus kajian yang ada dalam penelitian ini
- b. Pelaksanaan proses atau tahapan kebijakan publik serta pengaruh faktor politik dalam pembangunan.

Bagi pembangunan

Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tentang adanya faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desanya.

E. Kerangka Dasar Teori

Dalam penelitian social teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta yang didapat secara atau dibuktikan secara empiris. Teori berfungsi untuk mengarahkan perhatian atau untuk menerangkan, merangkum, pengetahuan, meramalkan fakta dan memeriksa gejala. Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial memberikan definisi sebagai berikut:

Teori adalah sebuah konsep atau construct yang berhubungan satu dengan yang lainnya, satu set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari

gejala. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara gejala social maupun gejala alam adalah teori.⁴

1. Partisipasi Politik Masyarakat

a. Definisi Partisipasi Politik Masyarakat

Setiap Negara demokrasi dalam kehidupan politiknya pasti partisipasi politik warga negaranya merupakan hal yang penting. Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.⁵

Huntington dan John M. Nelson berpendapat bahwa:

“ Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai individu – individu yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir, atau

⁴ Husaini usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.7

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/parpol>

spontan, mantap secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.⁶

Partisipasi politik aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan, dan keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan pribadi dari warga Negara baik secara individu maupun kelompok dalam berbagai proses politik tidak hanya berarti warga hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya, sebab jika ini sampai terjadi yang istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di barat.

b. Definisi Partisipasi Politik Dalam Konteks Pembangunan Desa

Dalam Konteks pembangunan desa, partisipasi politik masyarakat desa akan menghindari kebijakan pembangunan desa yang sentralistik dan ditujukan untuk kepentingan politik masyarakat. Dengan mengacu pada upaya masyarakat

⁶ Samuel P. Huntington dan John M. Nelson, dalam Miriam Budiarto. Partisipasi dan Partai Politik. PT. Gramedia, Jakarta, 1981

⁷ Tjokroamidjojo. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung Cet. 4.1991: 113

desa yang berprinsip pada lokalitas maka dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya partisipasi politik aktif dari masyarakat. Dalam era reformasi pada arus lokal dan sebagai upaya dalam rangka mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat desa, inisiatif, inovatif, dan kreatif untuk mendorong kemajuan otonomi asli desa dan menegakkan demokrasi local yang selam ini terpendam dan telah dimiliki masyarakat, serta upaya pemberdayaan masyarakat desa mencakup community development dan community-based development.⁸

Partisipasi politik dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi politik dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka pada hakekatnya proyek tersebut bukanlah proyek pembangunan desa.⁹

Kajian terhadap partisipasi politik masyarakat desa tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat desa. Memberdayakan politik masyarakat desa melalui pembangunan yang menetapkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan. Pembangunan desa tidak menempatkan masyarakat sebagai obyek, melainkan menempatkan masyarakat desa pada posisi yang tepat yaitu sebagai subyek dalam proses pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat harus melalui tiga tahapan:¹⁰

⁸ Moten, Abdul Rasyid dan Syed Sirajul Islam, 2005. Introduction to Political Science. Australia: Thompson. Hal:81-83

⁹ Taliziduhu Ndraha . Pembangunan. Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rieneka Cipta. Jakarta: 1990:103

¹⁰ Bolong Zainudin. 1987.Partisipasi Politik Kaum Nelayan: Studi kasus di kelurahan Anrong Appaka Kecaatan Pangkajene dan Kepulauan. P3MP YIIS UNHAS, Ujung pandang

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan Potensi Masyarakat berkembang,
2. Memperkuat potensi, daya, sumberdaya, atau energi yang terdapat pada politik rakyat dan dimiliki masyarakat dengan menyediakan input serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya memanfaatkan peluang,
3. Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah.

Pemberdayaan politik masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat dan menjadi mitra kerjasama dengan masyarakat mengutamakan kenerhasilan pembangunan desa .Juga untuk menuju political naturity dalam pembangunan desa berkaitan dengan sumber daya dan institutional performance sebagai usaha untuk mempertinggi akses masyarakat desa yang berpaut dengan kebijakan masyarakat terhadap prioritas program pembangunan dan mekanisme pengelolaannya. Pemberdayaan politik masyarakat merupakan proses pembaruan desa yang dimaksudkan untuk mengembalikan masyarakat kedalam pusaran utama proses kehidupsn berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan paritsiasi politik masyarakat dalam pencapaian hasil- hasil pembangunan desa¹¹ .

Partisipasi politik masyarakat dalam rencana pembangunan desa harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan. Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab

¹¹ Zainudin, Mubiyarto (dkk). 1984. Nelayan dan Kemiskinan Studi Ekonomi dan Antropologi di Dua Desa Pantai. CV. Rajawali. Jakarta. H:270

membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat baik individu maupun kelompok yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik karena menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam persepektif politik partisipasi politik adalah ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi aktif politik masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan, dan keterlibatan dalam memikul hasil manfaat pembangunan secara berkeadilan.¹²

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atas perilaku demokratisnya. Dan juga itu berarti bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan desa harus sesuai dengan kondisi fisiologi social dan ekonomi serta lingkungan kebudayaan, di desa. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian.¹³

¹² Weiner, Myron (ed.) 1971. Political Participation. Crissis Of The Political Process. Dalam Leonard Binder. Crisis and Sequences in Political Development. Princetown Unniversity Press : 203-205

¹³ Alfian 1986. Pemilu dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi Pancasila, dalam seri PRISMA, LP3ES, Jakarta:79-80

c. Bentuk-bentuk partisipasi politik¹⁴

- a) Bentuk Konvensional
- b) Adalah bentuk partisipasi politik masyarakat yang normal atau sah dalam demokrasi modern.
- c) Bentuk Non Konvensional
Adalah kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan cara tidak wajar.

d. Jenis-partisipasi politik

- a) Autonomous Participation
Adalah partisipasi politik dari masyarakat yang muncul dari diri mereka sendiri yang berdasarkan atas kesadaran individu.
- b) Mobilized Participation
Jenis partisipasi politik masyarakat yang digerakan oleh pihak lain, dan bukan berasal dari kesadaran mereka sendiri.

e. Faktor- Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat¹⁵

Menurut Millbrath ada 4 faktor utama yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

- a) Faktor perangsang.

¹⁴ Liddle, R. William.1992. partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada awal Orde Baru. Jakarta. Grafiti Press: 23-27

¹⁵ [http://id.wordpress.com/tag/partisipasi-politik/akses tanggal 22 nov 2009 jam 13.30](http://id.wordpress.com/tag/partisipasi-politik/akses%20tanggal%2022%20nov%202009%20jam%2013.30)

Karena adanya perangsang maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik .Dalam hal ini minat berpartisipasi di pengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi – diskusi politik melalui media massa atau dikusi informal.

b) Faktor Karakteristik individu yang berwatak sosial

Karakteristik Pribadi seseorang yang berwatak social, yang mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi dan lainnya yang dilakukan secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

c) Faktor karakteristik seseorang.

Faktor karakteristik sesorang ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan social ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku, seseorang dalam politik.

d) Faktor situasi atau lingkungan politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis akan membuat seseorang akan merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik.

Menurut Myron Werner paling tidak ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam suatu proses politik yaitu:

- a) Modernisasi
- b) Perubahan- perubahan struktur kelas
- c) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.
- d) Konflik diantara kelompok- kelompok pemimpin politik.

- e) Keterlibatan pemerintah yang lebih luas dalam urusan social, ekonomi dan kebudayaan.

Menurut Arenstein FR (1996) partisipasi politik masyarakat biasanya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:¹⁶

a. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga.

1. Tingkat pendapatan, adalah kondisi jumlah pemasukan atau pendapatn secara finansial seseorang atau masyarakat menurut jangka waktu. Tingkat pendapatan menunjukan faktor ekonomi.
2. Tingkat pendidikan, adalah kondisi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang.
3. Jumlah anggota keluarga, adalah kondisi dimana seseorang mempunyai beberapa anggota keluarga. Misal anak.

b. Faktor Politik

Faktor politik meliputi:

1. Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang dalam lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

¹⁶ [http://www.akademik.unsri.ac.id/jurnal/ file/ brapub/anisa/partisipasi politik](http://www.akademik.unsri.ac.id/jurnal/file/brapub/anisa/partisipasi_politik).(akses tgl 12 nov 2009: 13.00)

2. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Pengetahuan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.
3. Kontrol masyarakat dalam kebijakan Publik. Yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi, atau masukan dan gagasan atau ide tanpa intimidasi yang merupakan problem atau harapan rakyat.

f. Arti penting partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa

Proses pembangunan menunjukkan gejala yang meningkat, maka peran birokrasi pemerintahan desa merupakan proses yang semakin besar dan kompleks dimana kecenderungan arah baru dari proses pembangunan ini menekankan prinsip dari area bawah ke atas, oleh karena itu birokrasi pemerintah harus mampu melihat kenyataan pembangunan jika peran yang dimainkan bisa berhasil yaitu dengan mengembangkan manajemen pembangunan sumber daya yang berwawasan lokal, dengan menggunakan model pembangunan dimana program-program dan kebijakannya berasal dari bawah yakni melihat sampai dimana peran serta masyarakat.¹⁷

Kebijakan pelaksanaan otonomi dan pembangunan di desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, dimana masyarakat sebagai kesatuan sistem individu merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa. Dengan

¹⁷ Miftah Toha. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. MW. Mandala. Yogyakarta. 1991: 12

demikian jelas bahwa untuk mencapai suatu program pembangunan yang tidak bias mengabaikan keikutsertaan masyarakat, dimana masyarakat harus ditempatkan pada kedudukan yang semestinya, artinya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategis dan kebijakan dan juga keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara adil.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam empat tahap yaitu:

1. Partisipasi dalam Proses pembuatan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. Partisipasi dalam evaluasi

Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat dalam proses pembangunan pada dasarnya menyangkut 2 aspek:

1. Partisipasi sebagai hak, artinya bahwa setiap warga Negara mempunyai peluang yang sama untuk ikut serta guna memanfaatkan kesempatan yang timbul di dalam proses pembangunan dan ikut menikmati hasilnya.
2. Partisipasi sebagai kewajiban, artinya bahwa setiap warga Negara berkewajiban untuk ikut serta memikul beban dan tanggung jawab serta menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

¹⁸ Mubyarto. Strategi Pembangunan Desa. 1984: 56

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembangunan masyarakat dituntut untuk terlibat di dalamnya, baik itu kebijakan yang datang dari pemerintah atau dari masyarakat

2. Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

a. Definisi Masyarakat¹⁹

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia.

1. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
3. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

¹⁹ <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>
Akses tanggal 26 november 2009 jam 10.00

4. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
5. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.
6. Menurut Robert Masclver, masyarakat adalah suatu system hubungan – hubungan yang tertibkan.²⁰
7. Harrold J. Laski maka masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.²¹

b. Faktor-Faktor / Unsur-Unsur Masyarakat²².

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.

²⁰Miriam Budardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal 33 Jakarta, Gramedia, 1989

²¹Ibid. hal 10

²²<http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>. akses tanggal 26 november 2009 jam 10.45

4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat setia pada sistem tindakan utama.

c. Masyarakat Desa

a) Pengertian Masyarakat Desa

Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

Istilah desa dapat merujuk arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya.

Secara umum desa memiliki 3 unsur yaitu :

1. Daerah dan letak dalam arti tanah yang meliputi luas, lokasi
2. Penduduknya dalam arti jumlah, struktur umur, mata pencaharian
3. Tata kehidupan dalam arti corak, pola tata pergaulan dan ikatan warga desa.

b) Ciri-Ciri Masyarakat Desa²³

Adapun ciri yang menonjol pada masyarakat desa antara lain pada umumnya kehidupannya tergantung pada alam (bercocok tanam) anggotanya saling mengenal, sifat gotong royong erat penduduknya sedikit perbedaan penghayatan dalam kehidupan religi lebih kuat.

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta , kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
- b. *Orientasi kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan , tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- c. *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan

²³ <http://gudang.makalah.blogspot.com/2009/02/makalah-ciri-masyarakat-desa> (akses tanggal 26 november 2009 jam 11.35)

sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.(lawannya Universalisme)

- d. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.(lawanya prestasi).
- e. Kekabaran (*diffuseness*). Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.²⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat.
2. Desa memiliki 3 unsur yaitu : daerah dan letak, penduduk serta tata kehidupan.
3. Desa mempunyai ciri-ciri pokok kehidupan adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya.

²⁴ Sosiologi 3 SMU 1994, hal. 70

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Prof P. Siagian yang dimaksud dengan pembangunan adalah sebagai berikut

“Pembangunan Didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”²⁵

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha perubahan yang dilakukan secara sadar dan berencana oleh suatu Negara beserta pemerintahnya untuk modernisasi dan pembangunan merupakan perubahan social yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

b. Pengertian Pembangunan Desa

Tengku Syed Ibrahim As-Segaff mengungkapkan bahwa pada hakekatnya pembangunan pedesaan adalah suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untu

²⁵ Sondang. P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.1970: 2-3

menunjukkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil.²⁶

c. Permasalahan Umum dalam Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

- a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- d. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

²⁶ Ibrahim Assegaf. Sumber dari www.ibraassegaf.co.cc. diakses tanggal 9 nov 2009 jam 13.00)

Beberapa masalah pokok di atas perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum masyarakat desa menggunakan sumber daya pembangunan yang ada. Dengan demikian maka penyelesaian terhadap kelima masalah krusial diatas merupakan prasyarat bagi pembangunan desa yang baik.

d. Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.

Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.
- b. Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak

- c. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
- d. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan

2. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal.

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-program yang dapat dikembangkan diantaranya:

- a. Program pengembangan pendidikan
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga
- d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- e. Pembinaan kehidupan beragama
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

3. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakayatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan

guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah

- a. Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan pedesaan.
- b. Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian
- c. Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan

e. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.

4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

f. Manajemen Pembangunan Desa

Rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawarah (yang sering disebut musrenbangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. *Accountable*, Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. *Transparent*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
3. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
4. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana. Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat

kabupaten dan kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT-Desa).

g. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan program pembangunan desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hasil Musrenbangdes dibahas dengan tim koordinasi kecamatan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, Bappeda dan Dinas teknis melakukan *review* usulan program/kegiatan kembali ke kecamatan dalam rangka *justifikasi* program/kegiatan.

h. Pemberdayaan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat yakni upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri sendiri dan lingkungan secara mandiri. Di dalam UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menegaskan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan cara menumbuhkan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat.

Kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka otonomi pada saat ini sebenarnya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yaitu: dengan adanya kemiskinan dan kesenjangan, kurang berdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan aparatur pemerintah, kecenderungan kurangnya sifat patuh masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, rendahnya tingkat pengetahuan, ketrampilan dan akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan pemerintah. Keberadaan masalah di atas sangat bervariasi kadarnya disetiap tingkat pemerintah dan tergantung pada kondisi social ekonomi setiap daerah

i. Peran birokrasi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Priyo budi santoso dalam buku Birokrasi Pemerintah Orde Baru menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan:²⁷

1. Sebagai stabilisator dalam pembangunan. Berfungsi untuk menciptakan dan memberi situasi yang kondusif dalam masyarakat..
2. Sebagai motivator artinya sebagai penggerak dan pendorong dalam masyarakat untuk maju
3. Sebagai dinamisator, artinya berfungsi untuk membentuk hubungan yang baik dalam proses pembangunan masyarakat.

²⁷ Priyo Budi santoso. “ Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Tahun 1993

4. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Pasal 1 ayat 5 Peraturan pemerintah RI No. 72 dan 73 tahun 2005 tentang desa dan kelurahan memberikan dfinisi sebagai berikut:

“ Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI’.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁸

Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri²⁹

Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sedang menurut Paul H. Landis :Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut :

²⁸ HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT Raja grafindo Persada. Jakarta. 2003: 3

²⁹ Drs. H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, 2003, Hal.241

- a) mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam ,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari defenisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Dengan demikian berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah administrasi dan di dasarkan atas asal-usul masyarakatnya. Selain itu desa juga merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial,

ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

b. Pengertian Pemerintah desa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub system dari penyelenggaraan pemerintah sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang desa menyebutkan: “ Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD.”

Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Perundang-undangan diatas memberikan definisi pemerintah desa sebagai berikut: “ pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 11 terdiri dari kepala desa dan Perangkat desa”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan dalam penyelenggaraannya harus melibatkan Badan Perwakilan Desa yang posisi dan kedudukannya sama dengan pemerintah desa.³⁰

Penyelenggaraan pemerintahan desa selalu mengalami perubahan seiring dengan situasi kondisi dan situasi politik nasional. UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa kurang memberikan kebebasan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kenyataannya dengan berbagai UU pemerintahan, desa diperlemah karena diambil beberapa

³⁰ HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT Raja grafindo Persada. Jakarta. 2003: 20-21

penghasilannya dan hak upahnya. UU tentang pemerintahan desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak boleh hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan saja. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak boleh hanya dibiarkan begitu saja. Untuk itu perlu ditinjau ulang kelebihan dan kelemahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan reformasi.³¹

c. Tujuan pemerintah Desa³²

Tujuan dari adanya pemerintah desa yaitu:

- a) Penyeragaman pemerintahan desa
- b) Memperkuat pemerintah desa
- c) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- d) Menggerakkan masyarakat secara partisipasi bukan mobilisasi
- e) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif
- f) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa)

³¹ Widjaja Kepempinan Pemerintah Daerah. Universitas Samratulangi. 2003: 43-45

³² HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT Raja grafindo Persada. Jakarta. 2003: 14

d. Pemerintahan Desa Dalam Perbandingan Undang-Undang³³

Tabel 1.2 Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Desa

Bidang Perubahan	UU No. 5 tahun 1979	UU No. 22 tahun 1999	UU No. 31 tahun 2004
Nama Desa	Seragam	Tidak seragam	Tidak seragam
Susunan Organisasi Pemerintah	Kepala Desa, Perangkat desa, LMD	Kepala desa (sebutan lain), perangkat desa, BPD	Kepala desa, Perangkat desa, BPD
Kewenangan Desa	Kewenangan, hak-hak, kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan perda.	Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul. Ada, BPD sebagai lembaga tersendiri	Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul. Ada, BPD sebagai lembaga tersendiri
Lembaga Perwakilan	Tidak ada, hanya ada LMD sebagai bagian dari pemerintahan desa Dipilih oleh kepala desa	Dipilih oleh rakyat	Dipilih oleh rakyat
Keanggotaan Lembaga Perwakilan Tanggung jawab	Kepada Bupati dan memberikan Keterangan kepada LMD.	Kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati	Kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan kepada Bupati
Pengangkatan Kepala Desa	Dipilih Oleh rakyat dan diangkat oleh bupati	Dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh BPD. Bupati mengesahkan Kepala desa dan BPD menetapkan PerDes	Dipilih oleh rakyat dan ditetapkan oleh BPD. Bupati mengesahkan Kepala desa dan BPD menetapkan PerDes
Penetapan PerDes dan APBD	Ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dengan LMD	Camat sebatas administrative	Camat sebatas administrative
Hubungan dengan camat	Camat sebagai atasan Kepala Desa	Ditegaskan bersamaan pembiayaan	Ditegaskan bersamaan pembiayaan
Tugas pembantuan	Tidak ditegaskan bersamaan pembiayaan		
Pembangunan yang direncanakan kabupaten, propinsi atau pusat	Tidak pernah atau jarang melibatkan desa dalam perencanaannya	Wajib mengikutsertakan desa yang menjadi tempat pembangunan	Wajib mengikutsertakan desa yang menjadi tempat pembangunan
Tugas dan Kewajiban Kepala Desa	Penyelenggaraan dan penanggungjawaban utama dibidang pemerintahan pembangunan masyarakat termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.	Selain yang ada di UU sebelumnya ditambah dengan tugas mendamaikan perselisihan masyarakat di desa	Selain yang ada di UU sebelumnya ditambah dengan tugas mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

Sumber: Buku HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT Raja grafindo Persada. Jakarta. 2003: 14

³³ *Op.cit.* hal 21

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah usaha untuk memperjelas pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi overlapping atau kesalahan dalam memahami konsep yang akan dikemukakan.

a. Partisipasi politik.

Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakan keputusan politik, perilaku politik masyarakat baik individu maupun kelompok yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik karena menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi politik dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi politik dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka pada hakekatnya proyek tersebut bukanlah proyek pembangunan desa.

b. Masyarakat.

Merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama.

c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan.d. Pemerintahan desa.

d. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang dalam penyelenggarannya melibatkan Badan Perwakilan Desa yang posisi dan kedudukannya sama dengan pemerintah desa.

G. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional penelitian adalah unsur – unsur penelitian yang memberikan batasan- batasan tertentu untuk memberikan pengukuran suatu variable mencapai tujuan penelitian.

a) Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa³⁴

1. Faktor Sosial Ekonomi.

Faktor Sosial Ekonomi Meliputi :

a. Tingkat Pendapatan

³⁴ Arnstein, S.R .A Ladder of Citizen Participation. 1969.

b. Tingkat Pendidikan

c. Jumlah keluarga

2. Faktor politik:

Faktor Politik meliputi:

a. Kesadaran Politik

b. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

c. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pemikiran yang bersifat deduktif yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang keadaan sesungguhnya dari obyek penelitian yang didasarkan pada masalah yang dianggap bersifat umum ke khusus.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap Jawa Tengah terkait dengan masalah faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan dirasa sangat penting keberadaannya dalam menjalankan pemerintahan desa. Karena tanpa partisipasi politik dari masyarakat maka pembangunan akan berjalan secara tidak sempurna.

3. Unit Analisa

Karena penelitian ini akan mengkaji analisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa, maka unit analisa dalam penelitian ini adalah:

Masyarakat Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap. Penentuan masyarakat sebagai unit analisa data ditentukan secara random berdasarkan karakteristik tertentu yaitu kepala keluarga. Banyaknya jumlah responden yang dari masyarakat yaitu 100 responden dan juga Kepala Desa. Penulis menentukan 100 orang responden sebagai objek penelitian ini dihitung dari 10%nya jumlah Kepala Keluarga sebanyak 797 jiwa di desa ini.

Jadi unit analisa data dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Dan seorang kepala desa.

Data Yang Dibutuhkan

Ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari proses wawancara dengan masyarakat dan kepala desa Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten

Cilacap yang terlibat secara langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, media massa elektronik dan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara bersifat terbuka. Agar dapat memperoleh data obyektif maka model wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap responden dari obyek yang terpilih. Dalam penelitian ini responden yang akan dimintai keterangan adalah:

a) Warga Desa 3 orang (Bapak Nasihudin, Aji Sumarno, Sugito)

b) Kepala Desa.

b. Teknik Observasi

Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti.

c. Teknik kuesioner.

Teknik kuesioner berupa pembagian beberapa daftar pertanyaan yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pembangunan desa yang di bagikan kepada sejumlah 100 responden.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar³⁵. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga analisa tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif.

Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati³⁶. teknik analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Yang dimaksud analisa kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklarifikasikan, digambarkan dan jumlahnya sedikit. Dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk mendapat kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan sesuai dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan

³⁵ Lexy Moleong. *Metode Kualitatif*. PT. remaja Rosda Karya. Bandung. 1993: hal 103

³⁶ Ibid hal 103

laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian³⁷

³⁷ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta 1991.hal: 9